

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini merupakan implementasi Rencana Strategis di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah pada tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengupayakan seoptimal mungkin untuk menyusun dan menyajikan laporan ini, namun disadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Meskipun demikian bahwa Laporan ini sudah memenuhi standar sebagaimana yang diharapkan.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Palu, Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	3
1.2. Struktur Organisasi	4
1.3. Aspek Sasaran Strategis	5
1.4. Maksud dan Tujuan LAKIP	7
1.5. Sistematika Penyusunan LAKIP	8
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja OrganisasiI	11
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	6
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	20
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	27
3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta alternative Solusi yang telah dilakukan	30
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
3.2. Realisasi Anggaran	32
BAB. IV PENUTUP	36

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berbentuk Badan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya diwujudkan melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk didalamnya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

1.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
2. Pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

3. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Beberapa kewenangan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional ;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik ;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Agama;
- e. Penyiapan bahan Evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- f. Memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tersebut di atas sangat ditentukan oleh kesiapan personil yang handal dan terampil dalam mengemban tugas.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian :
 - Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub. Bagian Keuangan dan Asset;
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 - Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara;
4. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
 - Sub Bidang Kewaspadaan;

- Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
- 5. Bidang Politik, membawahi :
 - Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- 6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi :
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.

1.3. ASPEK SASARAN STRATEGIS

Dalam Penetapan Kinerja tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran yang ingin diwujudkan dalam waktu satu tahun. Adapun sasaran strategis serta pokok-pokok program dan kegiatan dalam pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi :

1.3.1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Demokrasi yang sehat dan partisipasi Politik Masyarakat di Sulawesi Tengah ; yang melekat pada Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sbb :

- Pemantapan Etika dan Budaya Politik
- Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Database Parpol di Daerah
- Forum Komunikasi Politik (Kopol)
- Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Bidang Politik
- Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia

1.3.2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara ; yang melekat pada

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sbb :

- Forum Pembauran Kebangsaan
- Dialog Kebangsaan
- Pembinaan Kesadaran Bela Negara
- Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sbb :

- Sosialisasi, Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

- Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkemas Kabupaten/Kota
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan

1.3.3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial; yang melekat pada : Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan sbb :

- Pengamatan, Pengawasan dan Pengamanan (Matwas)
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di daerah
- Koordinasi Penanganan Konflik di daerah
- Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah
- Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara
- Forum Komunikasi dan koordinasi pencegahan paham Radikal
- Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan kab/kota dalam rangka peningkatan kewaspadaan.

1.3.4. Sasaran Strategis : Menurunnya kasus/penyakit masyarakat (Pekat) ; yang melekat pada : Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan sbb :

- Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu
- Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

1.3.5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ; yang melekat pada : Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan kegiatan sbb :

- Forkom Peningkatan peran masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah.
- Pemantauan dan Evaluasi Ormas/LSM/Pengembangan Seni Budaya.
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- Forkom Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan/LSM
- Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM
- Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.

Penetapan kinerja dimaksudkan untuk menilai capaian kinerja Badan kesatuan bangsa dan politik Daerah tahun anggaran 2020. Hasil penilaian tersebut menjadi tolak ukur seberapa besar capaian kinerja pada tahun 2020. Dari hasil tersebut akan dijumpai berbagai permasalahan/hambatan utama yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang dicapai seperti kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur (PNS) yang belum memadai dan komitmen serta kreatifitas kerja yang masih terbatas dalam upaya Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, menjadi permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi saat ini.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah perwujudan dari pelaksanaan sistem pengendalian manajemen bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mencakup :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020.
- **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai bahan evaluasi internal atas pencapaian kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan perbaikan kinerja di masa datang,

sehingga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke depan dapat lebih ditingkatkan.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP 2020

Pada prinsipnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menyampaikan Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 juga menjelaskan secara singkat mengenai pencapaian tujuan dan sasaran utama yang ditetapkan dalam Renstra, kendala-kendala pencapaian, pemecahan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif ke depan.

Analisis atas Capaian Kinerja ini memungkinkan akan ditemukannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) sebagai bahan perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta alternative Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja .

BAB IV – PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB**2****PERENCANAAN KINERJA**

Pada Tahun 2020 ini terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja dan 4 sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel : Perencanaan Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial.	Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat	2 konflik
2.	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat di Sulawesi Tengah	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	76 %
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan pendahuluan Bela Negara.	1.000 orang
4.	Menurunnya Kasus/Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat	325 org/lap
5.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai-Nilai Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.	330 org/1 lap

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. 394.641.000	APBD
2. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 569.641.000	APBD
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 252.809.200	APBD
4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 154.301.800	APBD
5. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp. 100.000.000	APBD
6. Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Rp. 294.641.000	APBD

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/16/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran Indikator kinerja yang digunakan dalam laporan ini meliputi :

- a. **Indikator input** : dana, orang, organisasi, peraturan, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.
- b. **Indikator output** : barang dan fasilitas kerja, data dan informasi, kualitas SDM, pemberdayaan dan kemitraan dengan infrastruktur politik, fungsi suprastruktur politik, sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah serta lain-lain.
- c. **Indikator Outcome** : kinerja aparatur, partisipasi masyarakat, partisipasi infrastruktur politik, hubungan fungsional/koordinasi kelembagaan, stabilitas daerah, implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah, proses politik, integrasi sosial, dan lain-lain.

Adapun Capaian kinerja organisasi Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keamanan dan ketertiban Umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan Sosial	Menurunnya Jumlah konflik/kasus yang terjadi di Masyarakat	2 Konflik	2 Konflik	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
				1. Pengamatan, Pengawasan dan Pengamanan (Matwas)
				2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
				3. Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di daerah
				4. Koordinasi Penanganan konflik di daerah
				5. Forum Komunikasi Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan konflik di daerah
				6. Pemberdayaan Masyarakat perbatasan antar Negara
				7. Forum komunikasi dan koordinasi pencegahan Faham Radikal
				8. Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan kab/kota dalam rangka Peningkatan kewaspadaan
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan pendahuluan Bela Negara	500 Orang	75 Orang	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				1. Forum Pembauran

				Kebangsaan
				2. Dialog Kebangsaan
				3. Pembinaan Kesadaran Bela Negara
				4. Forkom Peningkatan peran generasi muda dan pramuka
		500 orang	-	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				1. Sosialisasi, Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan
				2. Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkemas kab/kota
				3. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Demokrasi yang sehat dan partisipasi Politik Masyarakat di Sulawesi Tengah	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	76 %	77,27 %	Program pendidikan Politik Masyarakat
				1. Pemantapan Etika dan Budaya Politik
				2. Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Database Parpol di Daerah
				3. Forum Komunikasi Politik (Kopol)
				4. Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undang Bid. Politik
				5. Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia
Menurunnya Kasus /Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat	325 org/ Laporan	50 org/laporan	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
				1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu
				2. Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai-Nilai Seni	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai	330 org/ laporan	150 org/laporan	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan			Kemasyarakatan
				1. Forkom Peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah
				2. Pemantauan dan Evaluasi Ormas/LSM/Pengembangan Seni Budaya
				3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
				4. Forkom Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM
				5. Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM
				6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Untuk mengetahui kinerja pada tahun 2020 ini maka sangatlah penting untuk melakukan komparasi antara target kinerja tahun 2020 dan realisasi kinerja tahun 2020. Capaian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini juga dimaksudkan untuk pengukuran tingkat capaian kinerja suatu organisasi yang sebelumnya telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dalam Laporan ini akan dipaparkan dalam bentuk matriks untuk memudahkan dalam menganalisis tingkat capaian selama satu tahun pelaksanaan kegiatan. Tabel dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	<u>Kegiatan</u>			

	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	80%	79%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah			
	<i>Kegiatan</i>			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 unit/buah	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	33 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	-	
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	19 unit/buah		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	<i>Kegiatan</i>			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	<i>Kegiatan</i>			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	8 orang		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	<i>Kegiatan</i>			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dok/lap	13 dok/lap	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dok/lap	2 dok/lap	
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal	1 dok/lap	1 dok/lap	
6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan			
	<i>Kegiatan</i>			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dok/lap	1 dok/lap	
	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan	2 dok/lap	2 dok/lap	
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
	<i>Kegiatan</i>			

	Dialog Kebangsaan	100 org	-	
	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 orang	-	
	Forum Pembauran Kebangsaan	50 orang	25 org	
	Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka	75 orang	50 org	
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
	<i>Kegiatan</i>			
	Sosialisasi, Seminar, peningkatan wawasan kebangsaan	125 orang	-	
	Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas	125 orang	-	
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	125 orang	-	
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
	<i>Kegiatan</i>			
	Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	1 laporan	1 laporan	
	Pemantapan Etika dan Budaya Politik	150 orang	-	
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Bidang Politik	150 orang	-	
	Forum Komunikasi Politik	150 orang	-	
	Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah	Laporan data base parpol	Laporan data base parpol	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			
	<i>Kegiatan</i>			
	Pengamatan, Pengawasan (Matwas)	1 laporan	4 laporan	
	Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah	125 org/laporan	30 org/1 laporan	
	Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah	130 orang/1 laporan	75 org/1 laporan	
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	150 orang	20 org	
	Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	125 orang	-	

	Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah	200 orang/1 laporan	30 org/1 laporan	
	Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal	125 orang	-	
	Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Prov dan kab/kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan	125 orang	205 org	
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			
	<i>Kegiatan</i>			
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu	150 orang	-	
	Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	175 orang	50 org	
11	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			
	<i>Kegiatan</i>			
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	80 orang	-	
	Forkom Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM	100 orang	50 org	
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	30 orang	-	
	Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya	1 laporan	1 laporan	
	Bimtek Aplikasi Data Base Ormas/LSM	30 orang	-	
	Forkom peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah	100 orang	100 org	

3.1.2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN BEBERAPA TAHUN YANG LALU

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya (Bab II Rencana Strategis) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan hanya

bisa dilaksanakan secara virtual karena situasi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan adanya pengurangan anggaran untuk pembiayaan alat kesehatan penanganan Covid-19 di Wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian rencana dari masing-masing kelompok indikator dan kinerja kegiatan yang diukur terutama pada indikator masukan, keluaran dan hasil.

**Tabel 3.1.2. TARGET KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Dan Tahun 2020**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN KE-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	<u>Kegiatan</u>								
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	20%	40%	60%	80%	20%	40%	60 %	79%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah								
	<u>Kegiatan</u>								
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	12 unit	15 unit	20 unit	34 unit	32 unit	32 unit	33 unit
	2. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	10 unit/buah	11 unit/buah	15 unit/buah	19 unit/buah	20 unit/buah	90 unit/buah	20 unit/buah	
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 Gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	-
	4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 unit/buah	10 unit/buah	12 unit/buah	15 unit/buah	9 unit/16 buah	111 unit/buah	45 unit/buah	-

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-
	2. Pengadaan Pakaian Olahraga beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Batik Khas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	<i>Kegiatan</i>								
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	6 orang	7 orang	8 org	8 orang	15 orang	31 orang	51 org	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap
	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap

	3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap
6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Serta Evaluasi Pembangunan								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	laporan	Laporan	laporan	laporan	laporan	Laporan	laporan	laporan
	2. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	50 org	50 org	50 org	50 orang	150 org	125 org	100 org	-
	2. Forum Pembauran Kebangsaan	50 org	50 org	50 org	50 orang	100 org	50 org	100 org	25 org
	3. Dialog Kebangsaan	100 org	100 org	100 org	100 org	125 org	125 org	100 org	-
	4. Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 org	100 org	100 org	100 orang	175 org	260 org	100 org	-
	5. Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka	75 org	75 org	75 org	75 orang	175 org	180 org	100 org	50 org

	6. Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	75 org	75 org	75 org	75 orang	200 org	185 org	100 org	-
	7. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah	50 org	50 org	50 org	50 orang	175 org	180 org	100 org	-
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Sosialisasi/seminar peningkatan wawasan kebangsaan	100 org	100 org	125 org	125 orang	100 org	150 org	100 org	-
	2. Orientasi Ketahanan Bangsa	100 org	100 org	125 org	125 orang	100 org	150 org	100 org	-
	3. Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK Orkesmas	100 org	100 org	125 org	125 orang	200 org	140 org	100 org	-
	4. Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100 org	100 org	125 org	125 orang	200 org	195 org	100 org	-
9	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Pengamatan, Pengawasan (Matwas)	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	4 lap
	2. Forum Kewaspadaan	100 org	130 org	150 org	150 orang	125 org	130 org	100 org	

	Dini Masyarakat (FKDM)								20 org
	3. Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing	100 org	100 org	100 org	125 org	100 org	100 org	60 org	30 org
	4. Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah	150 org/lap	175 org/lap	200 org/1 lap	200 org/1 lap	150 org/lap	180 org/lap	105 org/1 lap	30 org
	5. Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Di Daerah	100 org/lap	130 org/lap	130 org/1 lap	130 orang/1 laporan	250 org/lap	300 org/lap	150 org/1 lap	75 org/1laporan
	6. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	100 org	120 org	125 org	125 orang	200 org	200 org	150 org	-
	7. Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal	105 org	110 org	125 org	125 orang	300 org	200 org	150 org	-
	8. Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Prov. Dan kab/kota dalam rangka peningkatan kewaspadaan	100 org	120 org	120 org	125 orang	100 org	120 org	125 org	205 org
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)								
	<i>Kegiatan</i>								

	1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu	75 org	125 org	125 org	150 org	250 org	125 org	125 org	-
	2. Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	125 org	125 org	150 org	175 org	100 org	125 org	150 org	50 org
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang politik	125 org	150 org	150 org	150 org	250 org	150 org	250 org	-
	2. Pemantapan Etika dan Budaya Politik	150 org	150 org	150 org	150 org	200 org	150 org	150 org	-
	3. Analisa perkembangan politik dan pemetaan Data Base Parpol di daerah	lap	Lap	Lap	Lap	lap	Lap	lap	lap
	4. Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	lap	Lap	Lap	Lap	Lap	Lap	lap	lap
	5. Forum Komunikasi Politik (Kopol)	125 org	150 org	150 org	150 org	200 org	150 org	150 org	-
12	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan								
	<i>Kegiatan</i>								
	1. Peningkatan Kesadaran	85 org	85 org	85 org	80 orang	170 org	85 org	85 org	

	Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa								-
	2. Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM	100 org	100 org	100 org	100 orang	200 org	100 org	100 org	50 org
	3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	158 org	30 org	30 org	30 orang	120 org	30 org	30 org	-
	4. Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 laporan	1 Lap	1 Lap	1 lap	-
	5. Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM	30 org	30 org	30 org	30 orang	50 org	30 org	30 org	-
	6. Forkom peningkatan peran masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah	100 org	100 org	100 org	100 org	150 org	100 org	100 org	100 org

**Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020
Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Target Renstra Tahun Ke-			Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke-		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	<i>Kegiatan</i>						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	20%	40%	60 %	20%	40%	60%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah						
	<i>Kegiatan</i>						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	12 unit	15 unit	34 unit	32 unit	32 unit
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	10 unit/buah	11 unit/buah	12 unit/buah	20 unit/buah	90 unit/buah	20 unit/buah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 unit/buah	10 unit/buah	11 unit/buah	9 Unit /16 buah	111 Unit / buah	45 unit/buah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	<i>Kegiatan</i>						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	106 org	100%	100%	-	100 %
	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Batik khas Daerah.	100%	106 org	100%	100%	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	<i>Kegiatan</i>						
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	6 orang	7 orang	8 org	15 orang	31 orang	51 org
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	<i>Kegiatan</i>						
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap
	Penyusunan Laporan	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13 dok/lap	13	13

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dok/lap	dok/lap
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap	1 dok/lap
6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan						
	<i>Kegiatan</i>						
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan
	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program /Kegiatan	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap	2 dok/lap
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
	<i>Kegiatan</i>						
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	50 org	50 org	50 org	150 org	125 org	100 org
	Forum Pembauran Kebangsaan	50 orang	50 orang	50 org	100 orang	50 orang	100 org
	Dialog Kebangsaan	100 orang	100 orang	100 org	125 orang	125 orang	100 org
	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 orang	100 orang	100 org	175 orang	260 orang	100 org
	Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka	75 orang	75 orang	75 org	175 orang	180 orang	100 org
	Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	75 org	75 org	75 org	200 orang	185 orang	100 org
	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah	50 org	50 org	50 org	175 orang	180 orang	100 org
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
	<i>Kegiatan</i>						
	Sosialisasi,seminar, peningkatan wawasan kebangsaan	100 org	100 org	125 org	100 org	150 org	100 org
	Orientasi Ketahanan Bangsa	100 org	100 org	125 org	100 org	150 org	100 org
	Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas	100 org	100 org	125 org	200 org	140 org	100 org
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	100 org	100 org	125 org	200 org	195 org	100 org
9	Program Pemberdayaan						

	Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan						
	<i>Kegiatan</i>						
	Pengamatan, Pengawasan (Matwas)	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100 org	130 org	150 org	125 org	130 org	100 org
	Koordinasi Pemantauan Kegiatan Org Asing dan Lembaga Asing di daerah	100 org	100 org	100 org/laporan	100 org/laporan	100 org/laporan	60 org/laporan
	Koordinasi Penanganan Konflik di daerah	150 org/1 lap	175 org/1 lap	200 org/1 laporan	150 org/1 lap	180 org/1 lap	105 org/1 lap
	Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Di Daerah	100 org/1 lap	130 org/1 lap	130 org/1 lap	250 org/1 lap	300 org/1 lap	150 org/1 lap
	Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	100 org	120 org	125 org	200 org	200 org	150 org
	Forum Komunikasi dan Koordinasi pencegahan paham radikal	105 org	110 org	125 org	300 org	200 org	150 org
	Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Prov dan kab/kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan	100 org	120 org	120 org	100 org	120 org	org
10	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						
	<i>Kegiatan</i>						
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu	75 org	125 org	125 org	250 org	125 org	125 org
	Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	125 org	125 org	150 org	100 org	125 org	150 org
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat						
	<i>Kegiatan</i>						
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang politik	125 org	150 org	150 org	250 org	150 org	250 org
	Pemantapan Etika dan Budaya Politik	150 org	150 org	150 org	200 org	150 org	150 org
	Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Analisa perkembangan politik dan pemetaan Data Base Parpol di	Lap data base Parpol	Lap data base Parpol	Lap data base Parpol	Lap data base Parpol	Lap data base Parpol	Lap data base

	daerah						Parpol
	Forum Komunikasi Politik	125 org	150 org	150 org	200 org	150 org	150 org
12	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan						
	<i>Kegiatan</i>						
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	85 org	85 org	85 org	170 org	85 org	85 org
	Forkom Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM	100 org	100 org	100 org	200 org	100 org	100 org
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	30 org	30 org	30 org	120 org	30 org	30 org
	Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Bimtek Aplikasi Data Base Ormas/LSM	30 org	30 org	30 org	50 org	30 org	30 org
	Forkom peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah	100 org	100 org	100 org	150 org	100 org	100 org

INI SAMA ITA

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 ini dapat dilihat pada tabel 3.1.1 di atas. Adapun capaian kinerja sesuai Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian pada Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah menurunnya konflik sosial sebanyak 2 (dua) konflik dari target sebesar 2 (dua) konflik.
2. Capaian Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah 75 orang dari target 1.000 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa Capaiannya tidak sesuai target yang diharapkan karena situasi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan adanya pengurangan anggaran untuk pembiayaan alat kesehatan penanganan Covid-19 di Wilayah Sulawesi Tengah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilaksanakan secara virtual .
3. Capaian pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Program Pemberdayaan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan adalah 200 orang dari target 655 orang, Hasil ini menunjukkan bahwa Capaiannya tidak sesuai target yang diharapkan karena situasi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan adanya pengurangan anggaran untuk pembiayaan alat kesehatan penanganan Covid-19 di Wilayah Sulawesi Tengah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilaksanakan secara virtual.
4. Capaian target pada Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah adalah 77,27 % pada tahun 2019 dari target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ditetapkan 76 %, Capaian IDI Sulawesi Tengah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebelumnya hanya 75,29 % mengalami peningkatan sebesar 1,98%. Capaian Indeks Demokrasi Sulawesi Tengah untuk tahun 2020 akan diekspose pada kisaran bulan Juli atau Agustus tahun 2021 mendatang.

Setelah memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja maka alternatif solusi yang dapat ditempuh :

- a) Peningkatan sumberdaya pegawai yang dimiliki untuk lebih kreatif dalam mengembangkan dan merumuskan rencana program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan teknis kegiatan di bidangnya dapat lebih konsen terhadap upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.
- b) Pentingnya komitmen bersama dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar lebih mengedepankan program dan kegiatan yang prioritas, dengan memperhatikan target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya.
- c) Konsisten dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai Target dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan sumber daya, maka akan kami deskripsikan bahwa sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah pegawai sampai dengan akhir tahun 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 55 orang dengan rincian:

- I. Berdasarkan tingkat pendidikan (Data Desember 2020) :
 1. S3 : 1 Orang
 2. S2 : 10 Orang
 3. S1 : 23 Orang
 4. Sarjana Muda/D3 : 2 Orang
 5. SMA/SMK : 17 Orang
 6. SMP/SLTP : 2 Orang
- II. Berdasarkan pangkat/Golongan ruang (Data Desember 2020) :
 1. Golongan IV : 11 Orang
 2. Golongan III : 26 Orang
 3. Golongan II : 16 Orang
 4. Golongan I : 2 Orang
- III. Berdasarkan Eselonisasi terdiri dari (Data Desember 2020) :
 - a. Pejabat Struktural 16 orang, terdiri dari
 1. Eselon II : 1 Orang
 2. Eselon III : 4 Orang
 3. Eselon IV : 11 Orang
 - b. Staf 39 orang

Selain jumlah personil dengan komposisi seperti di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didukung pula oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

- Gedung Kantor yang terletak di Jl. Tanjung Api No. 7 Palu.
- Meubeler dan fasilitas kantor lainnya.
- Kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 (delapan) unit dan kendaraan dinas roda dua 25 (dua puluh Lima) unit.

Berdasarkan gambaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (baik PNS maupun sarana dan prasarana) yang dimiliki sudah efisien dalam mendukung pelaksanaan 12 (dua belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan selama tahun 2020.

3.1.6 ANALISIS PROGRAM/KINERJA KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), Program Pemberdayaan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dan Program Pendidikan Politik. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya jumlah konflik sosial maupun jumlah konflik partai politik, ini dapat diminimalisir melalui upaya pemeliharaan kondisi yang aman dan damai di masyarakat, meredam potensi konflik dan membangun sistem kewaspadaan dini di masyarakat dengan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran pengurus Partai Politik akan pentingnya berpolitik yang santun dan beretika serta pengembangan budaya politik di daerah yang makin demokratis sehingga potensi konflik sosial dan potensi di partai politik dapat diminimalisir, ditandai dengan terselenggaranya Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 berjalan lancar, aman dan terkendali.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah semula

sebesar Rp. **4.204.749.256,-** menjadi **Rp. 2.757.276.730,-** sehingga terjadi pengurangan sebesar **Rp. 1.447.472.526** yang di gunakan untuk pembiayaan alat kesehatan dalam penanganan Covid-19. dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **2.728.582.752,-** (98,96%) dan Realisasi fisik sebesar **..... %**. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran akan dimuat sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	% REALISASI	REALISASI FISIK %
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.101.513.460	1.080.651.979	98,11%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	314.407.353	309.552.731	98,46%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	32.917.200	32.917.200	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	4.500.000	4.500.000	100%	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.820.000	14.820.000	100%	100%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.819.000	1.819.000	100%	100%
	Peningkatan Kualitas perencanaan sistem Keuangan Internal	55.299.600	55.299.600	100%	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	159.994.617	159.872.800	99,92%	100%
	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	50.734.150	50.734.150	100%	100%

	Program/Kegiatan				
	Pemantapan Etika dan Budaya Politik	3.580.000	3.570.000	99,72%	
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Bidang Politik	55.903.000	55.903.000	100%	100%
	Forum Komunikasi Politik (KOMPOL)	4.732.000	4.332.000	91,55%	
	Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Database Parpol di Daerah	315.080.900	314.530.900	99,83%	
	Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	9.000.100	9.000.100	100%	100%
	Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka	18.223.400	18.223.400	100%	
	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	95.883.900	95.583.900	99,69%	
	Forum Pembauran Kebangsaan	21.538.100	21.538.100	100%	
	Dialog Kebangsaan	0	0	0	0
	Sosialisasi, Seminar, Peningkatan Wasbang	68.819.200	67.924.200	98,70%	
	Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkemas	0	0	0	0
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	9.991.400	9.991.400	100%	
	Pengamatan, Pengawasan (MATWAS)	63.809.542	63.284.542	99,18%	
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	13.388.900	13.388.900	100%	
	Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah	6.520.008	6.520.008	100%	
	Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di	54.827.200	54.827.200	100%	

Daerah					
Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	0	0	0	0	
Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah	10.328.000	10.328.000	100%		
Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal	0	0	0	0	
Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan kab/kota dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan	61.284.700	61.284.700	100%		
Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu	23.425.000	23.425.000	100%		
Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	34.986.050	34.810.000	99,50%		
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	49.708.950	49.708.950	100%		
Forkom Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM	23.176.000	23.176.000	100%		
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	19.550.000	19.550.000	100%		
Pemantauan dan Evaluasi Ormas/LSM/Pengembangan Seni Budaya	25.115.000	25.115.000	100%		
Bintek Aplikasi DataBase Ormas/LSM	21.150.000	21.150.000	100%		
Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap Perkembangan Kebudayaan/Kesenian di Daerah	11.250.000	11.250.000	100%		
TOTAL	2.757.276.730	2.728.582.752	98,96%		

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sudah menggambarkan hasil yang baik. Capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan telah memiliki sifat terpadu dan berkelanjutan sehingga merupakan pengembangan dan peningkatan implementasi Renstra dari tahun ke tahun.

Faktor pendukung lainnya adalah semangat kerja aparatur yang makin membaik serta kerjasama yang terjalin baik dengan instansi terkait, meskipun dukungan anggarannya menurun untuk membiayai semua kegiatan. Kendala yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi dalam pencapaian kinerja memerlukan solusi yang tepat guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang. Hal ini memerlukan perhatian yang serius dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah yang ditempuh pada masa mendatang dalam upaya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- a) Tersedianya fasilitas kerja dan berkembangnya sumber daya aparatur dengan indikator meningkatnya peran dan fungsi aparatur, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b) Mendorong peningkatan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Terfasilitasinya dan terpantaunya keberadaan infrastruktur politik, meningkatnya pendidikan politik masyarakat, terbangunnya wawasan kebangsaan, berkembangnya budaya politik demokratis dan beradab, serta terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- d) Tersedianya informasi sebagai bahan pengkajian perkembangan situasi dan kondisi daerah dan terpantaunya pelaksanaan kebijakan strategis daerah.

Demikianlah laporan akuntabilitas ini dibuat untuk perlunya.

Palu, Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si

Perbina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004